



Tabayyun : Journal Of Islamic Studies

Vol. 2 No. 2, 2024, E-ISSN : 3046-5729

Konsep Kepemimpinan Dalam Islam dan Perannya Dalam Penegakan Keadilan: Analisis Dalam Konteks Kontemporer

**Gifa Nur Syahara ¹, Sri Wulan Rambe ², Syawaliyah Fitri ³,
Fauzan Azhima ⁴, Zahra Qanita Sukmawardani ⁵**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia¹²³⁴⁵

Email : gifanur52@gmail.com ¹, sriwulanrambe07@gmail.com ²,

syawaliyahfitri217@gmail.com ³, azhimafauzan00@gmail.com ⁴,

zahraqanita1303@gmail.com ⁵

Abstract : Leadership occupies a central position in Islamic political and social thought, particularly in relation to the realization of justice and public welfare. However, contemporary studies on Islamic leadership tend to focus on normative and theological discussions without sufficiently connecting Islamic leadership principles to the challenges of modern governance. This study aims to analyze the concept of leadership in Islam, examine its role in the enforcement of justice, and reconstruct its relevance within contemporary governance frameworks. Employing a qualitative library research approach, this study analyzes primary Islamic sources, including the Qur'an and Hadith, alongside classical and contemporary scholarly works on Islamic leadership. The findings reveal that Islamic leadership is fundamentally grounded in the principles of trustworthiness (*amanah*), justice (*al-'adl*), consultation (*shura*), accountability (*al-mas'uliyah*), and public welfare (*maslahah*). These principles position leadership not merely as political authority but as a moral and ethical responsibility. Furthermore, the study argues that Islamic leadership can be reconstructed as an ethical leadership paradigm that aligns with contemporary governance principles such as accountability, participatory decision-making, transparency, and social justice. This reconstruction constitutes the main contribution of the study by demonstrating that Islamic leadership is not only a normative religious concept but also a relevant framework for addressing current challenges of governance, including corruption, abuse of power, and declining public trust in institutions. The study concludes that the values of Islamic leadership remain highly relevant in contemporary society and can contribute significantly to the development of ethical, accountable, and justice-oriented governance systems.

Future research is recommended to explore the empirical implementation of Islamic leadership principles in governmental, educational, and social institutions.

Keywords: Islamic Leadership; Justice; Governance; Amanah; Shura; Ethical Leadership.

Pendahuluan

Kepemimpinan adalah merupakan sebuah aspek penting di dalam kehidupan manusia, baik dalam keluarga, masyarakat, organisasi, maupun negara. Keberadaan pemimpin sangat dibutuhkan agar dapat mengatur, membimbing, dan menciptakan kehidupan yang tertib serta sejahtera. Tanpa adanya kepemimpinan, kehidupan sosial dapat mengalami kekacauan dan ketidakadilan.¹

Dalam pandangan Islam, kepemimpinan bukan hanya sekedar untuk dipahami sebagai kekuasaan atau jabatan, tetapi juga sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT dan masyarakat. Seorang pemimpin dituntut agar dapat berlaku adil, jujur, bijaksana, serta mengutamakan kepentingan umat manusia. Konsep kepemimpinan dalam Islam berlandaskan pada nilai keimanan, amanah, musyawarah, dan keadilan yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis.²

Permasalahan ini menjadi relevan untuk dikaji mengingat tantangan era kontemporer yang semakin kompleks. Globalisasi, perkembangan teknologi, sekularisasi politik, serta pluralitas masyarakat menuntut konsep kepemimpinan Islam untuk tidak hanya dipahami secara normatif-teologis, tetapi juga dioperasionalkan dalam konteks sosial-politik modern. Tanpa pemahaman yang utuh tentang prinsip-prinsip dasarnya serta strategi implementasinya, nilai-nilai keadilan yang menjadi tujuan utama kepemimpinan Islam berisiko hanya berhenti pada tataran wacana.

Berbagai penelitian mengenai kepemimpinan Islam pada umumnya berfokus pada pembahasan normatif mengenai konsep khalifah, imamah, amanah, dan syura. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih menempatkan kepemimpinan Islam sebagai konsep teologis yang berdiri sendiri dan belum banyak mengaitkannya

¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2013), h. 421.

² Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Leadership: Membangun Super Leadership Melalui Kecerdasan Spiritual*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 35.

dengan perkembangan teori kepemimpinan modern serta tuntutan tata kelola pemerintahan kontemporer. Padahal, meningkatnya kompleksitas persoalan publik seperti korupsi, krisis integritas, lemahnya akuntabilitas, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik menuntut hadirnya model kepemimpinan yang tidak hanya efektif secara administratif tetapi juga kuat secara moral. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji kembali konsep kepemimpinan Islam dan merekonstruksinya sebagai paradigma kepemimpinan etis yang relevan dengan prinsip-prinsip good governance dan penegakan keadilan pada era kontemporer.

Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi pemahaman tentang kepemimpinan Islam yang responsif terhadap tantangan zaman, sekaligus memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan wacana keadilan dalam sistem pemerintahan dan kemasyarakatan. Secara akademis, kajian ini diharapkan memperkaya literatur studi Islam dan politik. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi para pemangku kebijakan, aktivis, dan masyarakat dalam mendorong kepemimpinan yang berintegritas dan berorientasi pada keadilan.

Meskipun demikian, konsep kepemimpinan Islam tetap relevan diterapkan karena mengandung nilai-nilai universal yang menekankan keadilan, tanggung jawab, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini membahas konsep kepemimpinan dalam Islam, prinsip-prinsipnya, peran kepemimpinan dalam menegakkan keadilan, serta implementasi dan hambatannya di era kontemporer.³

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber data yang berkaitan dengan tema kepemimpinan dalam Islam. Sumber data yang digunakan meliputi Al-Qur'an, hadis, buku, jurnal ilmiah, artikel, serta berbagai literatur lain yang relevan dengan pembahasan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan membaca, memahami, dan mencatat informasi penting dari berbagai sumber yang berkaitan dengan konsep kepemimpinan Islam, prinsip-prinsip kepemimpinan, peran kepemimpinan dalam menegakkan keadilan,

³ Mubarak, "Konsep Kepemimpinan dalam Islam," *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 7, No. 2, 2021, h. 118.

serta implementasi dan hambatannya di era kontemporer.

Adapun teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan data yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan perspektif Islam untuk memperoleh pemahaman yang sistematis mengenai kepemimpinan dan penegakan keadilan dalam Islam

Pembahasan

A. Konsep Kepemimpinan Dalam Islam

Di dalam bahasa Inggris kepemimpinan disebut dengan istilah *leadership*, sedangkan pada bahasa Arab disebut dengan Imamah.⁴ Perkataan kepemimpinan menunjukkan pada semua perihal dalam memimpin, termasuk juga kegiatannya. Kepemimpinan dalam bahasa Arab disebut "Al-Imamah". Dalam ilmu Fiqih, Imamah diartikan dengan kepemimpinan dalam hal menjadi ketua atau lainnya, baik dia memberi petunjuk ataupun menyesatkan.

Kepemimpinan dalam islam adalah sebuah kepercayaan. Pada dasarnya ia merupakan kontrak yang tegas dan jelas antara pemimpin dan para pengikutnya yaitu dengan upaya melakukan yang terbaik untuk membimbing, melindungi dan memberlakukan secara jujur serta adil. Dengan demikian fokus kepemimpinan dalam Islam adalah terletak pada integritas dan keadilan.⁵ Kepemimpinan merupakan bentuk usaha untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas muslim menuju akhlak islami yang dilandasi dengan keimanan, ketaqwaan serta menjalankan syariat-syariat islam dalam aktivitas hidup baik di aspek kehidupan dunia maupun akhirat sebagai upaya untuk mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Pemegang amanah kepemimpinan dalam islam disebut dengan imam/imamah.⁶

Dalam sejarah peradaban islam kepemimpinan dikenal dengan beragam istilah yang mencerminkan tanggung jawab seorang pemimpin, seperti Khalifah, Imam, Amir, Uli al-Amri, dan Ra'in. Setiap istilah tersebut memiliki makna dan peran yang spesifik dalam mengatur kehidupan umat. Sebagaimana diuraikan Suhartawan (2021) berikut ini:

1. Khalifah, secara terminologi khalifah berarti pengganti kepemimpinan

⁴ Rasfiudin, Kriteria Pemimpin Dalam Islam, *Jurnal Cerdas Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2023, h. 16.

⁵ Nur Kholis, *Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam*, Al-Ijtima, Vol. 3, No. 1, 2002, h. 29.

⁶ Nadzmi Akbar, *Kepemimpinan Islam Kepemimpinan Yang Membimbing*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2018), h. 15.

Rasulullah Saw. Cakupan kepemimpinan khalifah yaitu meliputi persiapan kepemimpinan berikutnya sesuai dengan aturan syari'ah agar tercapainya kemaslahatan dunia dan akhirat.

2. Imam, dalam bahasa Arab kata "Imamah" berasal dari kata "imam," yang berakar dari "amma" yang berarti "menjadi ikutan." Imam bermakna "pemimpin atau teladan yang harus diikuti, yakni sosok yang selalu berada di depan." Pemimpin hendaknya selalu di depan sebagai teladan (leading by example).
3. Amir, istilah amir berarti pemerintah. Ketaatan kepada seorang pemimpin harus dilakukan tanpa memandang warna kulit, bentuk rupa, kekayaan atau kemiskinan, selama pemimpin tersebut berada dalam bimbingan Allah SWT. Ketaatan kepada pemimpin merupakan pilar penting dalam pemerintahan Islam. Umar bin Khattab mengatakan, "Tidak ada islam tanpa jamaah, tidak ada jamaah tana pemimpin dan tidak ada pemimin tanpa ketaatan.
4. Uli al-Amri, berarti seorang pemegang kekuasaan yang berhak memberi perintah. Ia memiliki wewenang untuk mengatur dan urusan umat. Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa': 83, kepemimpinan dikaitkan erat dengan kepemimpinan Allah dan Rasul-Nya. Setelah Nabi wafat, ulil amri menjadi rujukan dalam menyelesaikan masalah dan harus selalu ditaati.
5. Ra'in, Makna "ra'in" dalam sebuah hadis diibaratkan sebagai penjaga yang diberi amanah untuk mengurus bawahannya. Rasulullah SAW memerintahkan agar pemimpin menasihati setiap orang yang dipimpinya dan mengingatkan untuk tidak berkhianat.

Walaupun istilah-istilah tersebut berbeda, tapi tujuan utama kepemimpinan dalam Islam tetap sama, yaitu untuk melindungi agama dan mengatur kehidupan dunia. Hal ini dilakukan dengan mengajak kepada kebaikan dan mencegah keburukan. Pemimpin tidak hanya dituntut menyampaikan ajaran syariat, tetapi juga dapat mengelola kepentingan umat masyarakat dengan sebaik-baiknya.⁷

B. Konsep Kepemimpinan dalam Al-Qur'an dan Hadis

Kepemimpinan dalam islam bukan hanya sekedar tanggung jawab, melainkan juga sebagai amanah yang harus dipenuhi dengan penuh kesadaran dan integritas. Konsep dasar kepemimpinan dalam Al-Qur'an dan Hadis menjadi landasan yang kokoh bagi para pemimpin Muslim untuk menjalankan tugas mereka dengan baik.⁸ Dengan berandaskan

⁷ Fika Ratna Pratiwi, Konsep Kepemimpinan Islam (Studi Komparatif Al-Qur'an dan Hadis), *Jurnal Riset Ilmu Pendidikan islam*, Vol. 2, No. 2, 2025, h. 297. <https://doi.org/10.62359/tafakkur.v2i1.45>

⁸ Aris Mahmudi, dkk, *Kepemimpinan dalam pendidikan islam*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024),

aturan-aturan dalam Al-Qur'an dan Hadis, seorang pemimpin menjadikan syariat Islam sebagai dasar kepemimpinannya. Praktik ini telah berlangsung sejak zaman Rasulullah SAW dan terus berlanjut hingga era khilafah Islam yang dipimpin oleh seorang khalifah. Menurut Mubarak (2021) konsep kepemimpinan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an diantaranya yaitu manusia dalam konsep kekhilafaan yang tertuang pada firman Allah Q.S. Al-Baqarah: 30.

“(ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.

Ayat tersebut menegaskan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi, yang mengembangkan tanggung jawab untuk memakmurkan dan mengelola alam sesuai dengan ketentuan Allah. Sejalan dengan hal tersebut, Mubarak (2021) menyatakan bahwa tujuan utama penciptaan manusia adalah untuk mengemban dua peran penting: sebagai khalifah Allah SWT dan sebagai hamba Nya. Jaelani & Surhayat (2022) menambahkan bahwa Allah SWT memberikan tugas kepada manusia sebagai khalifah di dunia, yang mencakup tanggung jawab untuk memimpin dan membimbing orang lain untuk beribadah kepada Nya serta menghadirkan kebaikan bagi banyak orang.⁹

Kepemimpinan merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan umat manusia, agar kehidupan pribadi, organisasi atau perusahaan, bahkan negara, akan lebih terarah. Hal ini termaksud dalam hadits Nabi Muhammad SAW bahwa setiap kita atau individu dan imam pun akan diminta pertanggungjawabannya, sebagaimana dalam hadits Nabi:

Nabi bersabda: Ingatlah bahwa setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban dari yang dipimpinnya, seorang imam adalah pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban dari yang dipimpinnya, seorang laki-laki adalah pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban dalam keluarganya, seorang perempuan adalah pemimpin dalam rumah suaminya, dan akan dimintai pertanggungjawaban, pekerja adalah pemimpin dalam harta

h. 6.

⁹ Fika Ratna Pratiwi, Konsep Kepemimpinan Islam (Studi Komparatif Al-Qur'an dan Hadis), *Jurnal Riset Ilmu Pendidikan islam*, Vol. 2, No. 2, 2025, h. 298-299. <https://doi.org/10.62359/tafakkur.v2i1.45>

tuannya, akan dimintai pertanggungjawaban dari yang dipimpinnya. Setiap kamu adalah pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban dari yang dipimpinnya (HR. Muslim).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa setiap orang adalah pemimpin, dan setiap imam atau pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya baik di dunia maupun di akhirat. Islam menilai betapa pentingnya amanah yang diberikan kepada seorang pemimpin, sampai harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Jika ditelaah lebih dalam, Islam sangat mengutamakan hubungan yang sangat humanis antar sesama umat manusia, bahkan bawahan sekalipun.¹⁰

C. Tujuan Utama Kepemimpinan

Pemimpin dibutuhkan oleh umat, baik dalam masyarakat kecil maupun besar, karena dengan adanya pemimpin kehidupan umat menjadi lebih teratur dan baik. Sebaliknya, tanpa pemimpin akan timbul keresahan, kekacauan, dan kehancuran. Karena itu, Islam selalu membimbing pemeluknya untuk hidup bersama pemimpin, seperti imam salat, pemimpin perjalanan, amil zakat, pemimpin haji, pemimpin rumah tangga, pemimpin perang, hingga pemimpin negara.

Menurut Imam Al-Mawardi, menegakkan kepemimpinan dalam Islam merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menegaskan bahwa keberadaan pemimpin sangat penting karena kepemimpinan memiliki dua tujuan pokok:

1. Likhilafati an-nubuwwah fi hirāsati ad-dīn, yaitu sebagai pengganti misi kenabian dalam menjaga agama.
2. Wasiyāsati ad-dunya, yaitu untuk mengatur urusan dunia.

Dengan kata lain, tujuan kepemimpinan adalah menciptakan rasa aman dan keadilan, mewujudkan kemaslahatan, menegakkan amar makruf nahi munkar, mengayomi rakyat, serta mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat.¹¹

D. Prinsip-Prinsip Dasar Kepemimpinan Islam Dalam Mewujudkan Keadilan

Prinsip keimanan terhadap kesuksesan kepemimpinan. Dalam QS. An-Nur:55 ditegaskan bahwa Allah SWT memberikan janji berupa

¹⁰ Ilfi Nur Diana, *Kepemimpinan Islam*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2021), h. 71-72.

¹¹ Nur Fazillah, Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam, *Journal of Education Sciences and Teacher Training*, Vol. 12, No. 1, 2023, h. 118.

kekuasaan, keamanan, serta keteguhan dalam beragama kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Mubarok (2021) menyatakan bahwa keberhasilan kepemimpinan tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan material, melainkan sangat dipengaruhi oleh kualitas keimanan dan konsistensi dalam beramal saleh. Dengan demikian, iman menjadi landasan fundamental dalam membentuk kepemimpinan yang kokoh dan berorientasi pada nilai-nilai kebaikan.¹²

Prinsip ulil amri dalam kepemimpinan. Konsep ulil amri merupakan elemen penting dalam struktur kepemimpinan Islam. Suhartawan (2021) menjelaskan bahwa ulil amri merujuk pada pihak yang memiliki otoritas dalam mengelola urusan masyarakat. Sejalan dengan itu, Salim dalam Pramitha (2017) mendefinisikan ulil amri sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam mengatur, mengendalikan, serta menetapkan arah kebijakan. Dalam QS. An-Nisa:59 ditegaskan kewajiban untuk menaati Allah, Rasul, dan ulil amri. Namun demikian, Mubarok (2021) menegaskan bahwa ketaatan tersebut bersifat bersyarat, yakni selama tidak bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasul. Apabila terjadi perbedaan pendapat, maka penyelesaiannya harus dikembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Sementara itu, Pramitha (2017) menjelaskan bahwa QS. An-Nisa:83 menunjukkan adanya kesinambungan kepemimpinan pasca kenabian, yang dilanjutkan oleh ulil amri sebagai otoritas dalam kehidupan sosial umat Islam.¹³

Musyawarah merupakan prinsip utama dalam kepemimpinan Islam yang menekankan pentingnya partisipasi kolektif dalam proses pengambilan keputusan. Al-Qur'an mengarahkan agar seorang pemimpin melibatkan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pertimbangan yang bijaksana. Dengan adanya musyawarah, keputusan yang dihasilkan tidak bersifat sepihak, melainkan melalui proses pertimbangan yang komprehensif. Selain itu, musyawarah juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial untuk memastikan bahwa kepemimpinan tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.¹⁴

¹² Subhan Mubarok, Prinsip Kepemimpinan Islam Dalam Pandangan Al-Qur'an. *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, Vol. 1, No. 1, 2024, h. 6 <https://doi.org/10.57163/Almuhafidz.Vol.2>

¹³ Fika Ratna Pratiwi, Konsep Kepemimpinan Islam (Studi Komparatif Al-Qur'an dan Hadis), *Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 2, 2025, h. 23. <https://doi.org/10.62359/tafakkur.v2i1.4>

¹⁴ Devi Pramitha, Kajian Tematis Al-Qur'an dan Hadits Tentang Kepemimpinan. *JPAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 3, No. 1, 2017. <https://doi.org/10.18860/j-pai.v3i1.3989>

Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam mewujudkan kepemimpinan yang efektif dan berkeadaban. Pemimpin dituntut untuk bersikap objektif, tidak diskriminatif, serta mampu menempatkan segala sesuatu secara proporsional. Prinsip keadilan tidak hanya tercermin dalam kebijakan yang diambil, tetapi juga dalam perlakuan terhadap setiap individu tanpa memandang latar belakang. Dengan terwujudnya keadilan, kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin akan meningkat, sehingga stabilitas sosial dapat terpelihara. Dalam praktiknya, prinsip ini dapat diimplementasikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang transparan dan akuntabel.

Amanah dan tanggung jawab. Kepemimpinan dalam Islam erat kaitannya dengan konsep amanah, yaitu kepercayaan yang harus dijaga dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Setiap kewenangan yang dimiliki oleh pemimpin pada hakikatnya merupakan titipan yang harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pemimpin dituntut untuk menjunjung tinggi kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan yang diambil. Prinsip ini berfungsi sebagai landasan etis agar kekuasaan tidak disalahgunakan dan tetap diarahkan pada kepentingan bersama.

Kebebasan berpikir. Kepemimpinan yang ideal juga memberikan ruang bagi kebebasan berpikir serta keterbukaan terhadap kritik. Dalam QS. Al-Kahfi (18):54 dijelaskan bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk banyak membantah, yang menunjukkan pentingnya ruang dialog dalam kehidupan sosial. Pemimpin yang baik adalah mereka yang mampu menerima masukan secara konstruktif serta mendorong partisipasi aktif anggota dalam menyampaikan pendapat. Dengan demikian, proses pengambilan keputusan menjadi lebih inklusif dan kaya perspektif.¹⁵ Keimanan, ketaatan kepada ulil amri, musyawarah, keadilan, amanah, dan keterbukaan terhadap kritik akan menghasilkan model kepemimpinan yang mampu mewujudkan kemaslahatan serta menjaga keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.

E. Peran Kepemimpinan Dalam Menegakkan Keadilan Menurut Perspektif Islam

Kepemimpinan dalam perspektif Islam merupakan tanggung jawab besar yang diberikan kepada seseorang untuk mengatur, membimbing, serta menjaga urusan kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai

¹⁵ Veithzal Rivai, *Kiat Memimpin Abad Ke-21* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 74-79.

syariat. Dalam Islam, kepemimpinan tidak hanya dimaknai sebagai kekuasaan politik atau jabatan formal, melainkan sebagai tanggung jawab moral dan spiritual yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu, seorang pemimpin tidak boleh menjalankan kekuasaan berdasarkan hawa nafsu, kepentingan pribadi, ataupun keuntungan golongan tertentu, tetapi harus berorientasi pada kemaslahatan umum dan tegaknya keadilan.¹⁶

Keadilan menjadi prinsip utama dalam sistem kepemimpinan Islam. Tanpa keadilan, kekuasaan akan berubah menjadi alat penindasan, hukum menjadi tajam kepada pihak lemah dan tumpul kepada pihak kuat, serta masyarakat akan kehilangan rasa aman. Oleh karena itu, Al-Qur'an menegaskan kewajiban setiap pemimpin untuk menegakkan keadilan secara konsisten, bahkan ketika keputusan tersebut berdampak merugikan dirinya sendiri maupun orang-orang terdekatnya.¹⁷ Dalam konteks ini, keberhasilan seorang pemimpin tidak ditentukan dari lamanya masa kekuasaan, melainkan dari sejauh mana ia mampu mewujudkan keadilan bagi Masyarakat yang dipimpinnya. Bentuk-bentuk nyata peran kepemimpinan dalam menegakkan keadilan adalah sebagai berikut:

1. Menegakkan Hukum Secara Sama dan Tidak Memihak

Salah satu bentuk nyata peran kepemimpinan dalam menegakkan keadilan adalah memastikan hukum berlaku sama kepada seluruh lapisan masyarakat. Dalam Islam, tidak ada perbedaan perlakuan hukum dalam islam antara pejabat, rakyat biasa, orang kaya, maupun orang miskin. Rasulullah SAW, pernah menegaskan bahwa kehancuran umat terdahulu disebabkan karena mereka membiarkan orang terpendang lolos dari hukuman, sementara orang lemah dihukum dengan keras.¹⁸

Hadis ini menunjukkan bahwa diskriminasi hukum merupakan bentuk kerusakan besar dalam pemerintahan. Secara konkret, pemimpin yang adil harus memastikan bahwa lembaga peradilan berjalan independen, aparat penegak hukum bekerja profesional, dan setiap warga memperoleh kesempatan yang sama dalam mencari keadilan. Misalnya, apabila terjadi kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi, maka pemimpin tidak boleh menutupinya demi menjaga citra pemerintahan. Sebaliknya, kasus tersebut harus

¹⁶ Yusuf al-Qaradawi, *FiQh al-Daulah fi al-Islam* (Kairo: Dar al-SyuruQ, 1997), h. 45

¹⁷ Qs. An-Nisa': 135.

¹⁸ Hr. Bukhari No. 3475 dan Muslim No.1688.

diproses sesuai hukum agar masyarakat melihat bahwa keadilan benar-benar ditegakkan.

2. Melindungi Hak dan Martabat Rakyat

Dalam Islam, rakyat bukan sekadar objek kekuasaan, melainkan tanggung jawab yang wajib dijaga. Oleh karena itu, para pemimpin bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak dasar masyarakat, seperti hak hidup, hak beragama, hak mendapatkan pendidikan, hak memperoleh keamanan, serta hak memiliki harta benda secara sah. Al-Mawardi menjelaskan bahwa menjaga agama dan mengatur urusan dunia adalah tugas pemimpin untuk menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.¹⁹ Perlindungan hak asasi manusia dapat diwujudkan melalui penyediaan layanan kesehatan yang murah, pendidikan yang adil, keamanan lingkungan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan seperti fakir miskin, anak yatim, perempuan, dan lansia. Jika rakyat hidup dalam ketakutan, kelaparan, atau tidak memiliki kesempatan untuk memenuhi kebutuhan dasar, maka pemerintah menunjukkan bahwa fungsi kepemimpinan tidak bertindak secara adil.

3. Mewujudkan Keadilan Sosial dan Ekonomi

Keadilan dalam Islam tidak hanya mencakup dengan hukum pidana atau peradilan, tetapi juga mencakup keadilan sosial dan ekonomi. Pemimpin harus memastikan bahwa kekayaan negara dapat dirasakan oleh semua orang, bukan hanya oleh kalangan elit. Islam mengenalkan dan membagikan keadilan secara menyeluruh untuk zakat, sedekah, baitul mal, dan pembagian harta untuk mengurangi kesenjangan sosial.²⁰ Contoh nyata dapat dilihat pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Beliau sering turun langsung melihat keadaan rakyat pada malam hari. Ketika menemukan keluarga yang kelaparan, Umar sendiri memikul gandum dari baitul mal untuk diberikan kepada keluarga yang kelaparan.²¹

Peristiwa ini menunjukkan bahwa pemimpin yang adil tidak hanya membuat kebijakan dari belakang meja, tetapi juga bertindak secara langsung untuk membantu rakyat dalam menyelesaikan penderitaan rakyat. Pada perkembangan zaman modern, bentuk keadilan ekonomi dapat diwujudkan melalui penciptaan lapangan kerja, subsidi untuk masyarakat miskin, pembangunan infrastruktur

¹⁹ Al-Mawardi, *Al Ahkam al-Sulthaniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1985), h. 15.

²⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Daur al-zakab fi 'Ilaj al-Musykilat al-Iqtisadiyyah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), h.56.

²¹ Ibn al-Jawzi, *Manaqib Umar ibn al-khattab* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001), h. 122.

secara adil, dan kebijakan pajak yang tidak memberatkan rakyat kecil.

4. Menjadi Teladan Moral dan Integritas

Pemimpin memiliki pengaruh besar terhadap budaya masyarakat. Jika pemimpin jujur, sederhana, disiplin, dan amanah, maka rakyat cenderung meniru nilai-nilai tersebut. Sebaliknya, jika pemimpin hidup mewah dari hasil korupsi, suka berbohong, dan menyalahgunakan jabatan, maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap negara. Quraish Shihab, menyatakan bahwa keteladanan pemimpin merupakan salah satu komponen penting dalam terciptanya masyarakat yang beradab dan tertib.²² Seorang pemimpin menjadi teladan moral dengan menjalani gaya hidup yang sederhana, transparan tentang penggunaan anggaran negara, bersedia menerima kritik, dan tetap setia pada janji pemimpin kepada rakyat. Pemimpin yang jujur akan dihormati bukan karena kekuasaannya, tetapi karena kejujuran dan tanggung jawabnya.

5. Menyelesaikan Konflik dengan Bijaksana

Dalam kehidupan masyarakat, perbedaan kepentingan sering melahirkan konflik. Jika para pemimpin memihak salah satu kelompok demi kepentingan pribadi, konflik akan semakin meningkat. Pemimpin berfungsi sebagai penengah dalam menyelesaikan konflik yang adil dan damai. Al-Qur'an menyatakan bahwa ketika dua kelompok berselisih, maka harus didamaikan dengan cara yang adil dan tidak berat sebelah.²³ Pemimpin dapat menyelesaikan konflik antar individu, organisasi, musyawarah, atau politik dengan menggunakan pendekatan persuasive, mediasi, musyawarah, dan dialog. Sebaliknya, kebijaksanaan dan netralisasi akan menjaga persatuan masyarakat.

6. Mencegah Kezaliman dan Penyalahgunaan Kekuasaan

Islam sangat keras mengancam pemimpin yang zalim. Kekuasaan bukan alat untuk memperkaya diri, meningkatkan kekuatan keluarga, atau menghalangi lawan politik. Rasulullah SAW bersabda bahwa para pemimpin yang bertindak adil akan mendapat kedudukan mulia di sisi Allah, sedangkan pemimpin yang bertindak zalim akan mendapat ancaman yang berat di akhirat.²⁴ pemberantasan korupsi, pengawasan pejabat, transparansi anggaran, dan penipuan yang sah

²² M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 301

²³ Qs. Al-Hujurat: 9

²⁴ HR. Muslim No.1827.

adalah cara untuk mencegah kezaliman. Hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme hukum yang kuat, audit independent, dan keterbukaan informasi publik.

7. Menjalankan Musyawarah dalam Pemerintahan

Menurut ajaran Islam, keputusan penting harus di buat melalui musyawarah. Prinsip ini menunjukkan bahwa pemimpin tidak boleh menjadi otoriter atau merasa paling benar sendiri. Dengan musyawarah, mengambil keputusan akan lebih adil karena mempertimbangkan berbagai kebutuhan dan perspektif masyarakat.¹⁰ Secara khusus, musyawarah dapat diterapkan melalui rapat bersama ahli, berbicara dengan tokoh masyarakat, memperhatikan keinginan rakyat, dan melibatkan lembaga perwakilan dalam pengambilan keputusan. Pemimpin yang ingin bermusyawarah menunjukkan kerendahan hati dan komitmen terhadap keadilan.

Rasulullah SAW menegaskan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya.²⁵ Hadis ini menunjukkan bahwa jabatan dalam Islam bukanlah simbol kemuliaan semata, melainkan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh keadilan dan tanggung jawab. Seorang pemimpin Islam harus memiliki sifat amanah, jujur, bijaksana, adil, serta mampu mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Pemimpin juga dituntut untuk menjadi teladan moral bagi masyarakat karena perilaku pemimpin akan memengaruhi kondisi sosial dan budaya masyarakat secara luas.

F. Bagaimana Implementasi Serta Apa Saja Yang Menjadi Hambatan Di Dalam Konsep Kepemimpinan Islam Dalam Penegakan Keadilan Di Era Kontemporer

Kepemimpinan adalah suatu kemampuan /keahlian kecerdasan yang mendorong sejumlah orang untuk bekerjasama dalam melakukan kegiatan kegiatan yang lebih terarah dan terstruktur untuk mencapai tujuan Bersama. Kepemimpinnya juga merupakan kemampuan dalam mempengaruhi, memotivasi dan memeberikan arahan/perintah kepada sejumlah orang secara langsung agar tercapainya tujuan tujuan yang diinginkan Bersama. Kepemimpinan dalam islam merupakan suatu hal pokok untuk suatau kepribadian islam yang sudah di berikan contohnya

²⁵ HR. Bukhari No. 7138 dan Muslim No. 1829.

melalui perilaku Nabi Muhammad SAW. Yang mana beliau membuktikan bahwa seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu memberikan dorongan untuk para pengikutnya agar melayani orang lain agar dapat unggul di dalam kehidupannya. Sebagai seorang pemimpin, pastinya seseorang terikat oleh sebuah kedudukan yang di percayakan oleh tuhan agar selalu bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menegakkan sebuah keadilan, kesetaraan, dan kesepahaman dalam semua urusan dunia.²⁶

G. Implementasi konsep Kepemimpinan Islam Dalam Penegakan Keadilan Di Era Kontemporer

Secara ilmiah penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai bagaimana kepemimpinan islam dapat dikontekstualisasikan dalam kerangka negara demokratis modern. Ulil amri bukan hanya sekedar intrerprestasi terhadap otoritas, tetapi juga merupakan sebuah konsep politik yang memiliki daya guna dama memperkaya Pembangunan tata kelololah sebuah pemerintahan yang etis dan berkeadilan. Penemuan ini pertinya juga mendukung hipotensi awal bahwa kepemimpinan islam di Indonesia ternyata lebih condong kepada pengimplementasian nilai nilai uli amri dibandingkan kepemimpinan dengan konsep khalifa dan imamah, yang di karenakan sifatnya yang dianggap lebih kompatibel dengan prinsip kepemimpinan yang berprinsip demokrasi constitutional. Pemikiran ini juga konsisten dengan wacana islam politik kontemporer yang sangat menekankan pada pentingnya dialong antara nilai-nilai religious dengan system pemerintahan modern.

Secara praktis, pemgiatan ulil amri dalam sebuah wacana public dengan kebijakan kenegaraan yang dapat berfungsi sebagai strategi dalam meredam dan menstabilkan ekstremisme serta mempromosikan tata Kelola yang berdasarkan pada nilai nilai islam moderat. Peran aktif dari organisasi masyarakat besar sangat berpengaruh seperti nu dan Muhammadiyah dalam mendefenisikan dari ulil amri sebagai pemimpin yang sah dalam sebuah system demokrasi yang memperkuat posisi ideologi Indonesia sebagai negara yang menganut nilai nilai religious akan tetapi bukan teoktaris. Jasni dan Sharip memberikan pernyataan bahwa kepercayaan public terhadap kepemimpinan islam tidak hanya

²⁶ Maulidiyah Amaliana Rizqi dan Abdu Kadir Alamudi, Analisis Kepemimpinan Islam Pada Era Modern. *Jurnal Manajerial*. Vol, 12. No, 2, 2025, h. 315-331. <http://dx.doi.org/10.30587/jurnalmanajerial.v12i02.9782>

bergantung pada afiliasi agama tetapi juga terhadap kapabilitas mereka dalam mengelolah negara secara profisional dan bermoral.²⁷

Penelitian-penelitian ini secara teoritis menunjukkan bahwa dengan di menjadikannya sebagai dimensi spiritual menjadi komponen kunci, model kepemimpinan islam dapat memperluas bidang studi kepemimpinan. Dalam praktiknya pendekatan ini mampu untuk digunakan sebagai proram pengembangan kepemimpinan, seperti yang ditawarkan oleh Lembaga pemerintahan, Lembaga Pendidikan, dan kelompok sosial keagamaan. Islam memberikan persfertif yang berbeda dalam bidang ini, dengan menekankan nilai moralitas, kesadaran spiritual, dan rasa akan tanggung jawab sosial serta spiritual yang sehat. Oleh karena itu pengendalian internal sering kali lebih efektif dibandingkan dengan hukumam eksternal. Kepemimpinan islam masih berlaku hingga era kontemporer, yang di tandai dengan meningkatnya individualisme, dilema etika dan kurangnya kejelasan terhadap nilai nilai. Dalam menghadapi dunia masa kontempore yang penung dengan fragmasi masyarakat, contoh Nabi Muhammad SAW dalam menyeimbangkan keragaman, menjaga persatuan, dan menegakkan keadilan yang bertindak sebagai motivasi. Kepemimpinan islam menonjol sebagai contoh yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, pengabdian kepada masyarakat, dan penghormatan terhadap tuhan. Prinsip prinsip ini mampu membantu dalam mengembalikan otoritas moral dan legitmasi dari seorang pemimpin.²⁸

Adapun konteks kepemimpinan adil di era modern ialah:

1. Keanekaragaman dan Inklusi.
2. Transparansi dan Komunikasi.
3. Keseimbangan Kerja.
4. Pelmberdayaan Karyawan.
5. Pelngakuan dan Penghargaan.
6. Responsiblilitas Sosial dan Lingkungan.
7. Pemahaman Teknologi.

²⁷Roni Rahmad Hasonangan Ritonga dan Zulkarnaen, Kajian Implementasi Kepemimpinan Islam (Imamah, Khalifah, Dan Ulil Amri) Di Indonesia. *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*. Vol, 8. No, 2, 2025, h. 22082225. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i2.2348>

²⁸Desi Salsabilla Atanaya, dkk, Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif Islam: Suatu Studi Literatur. *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*. Vol, 2. No, 3, 2025, h. 234-246. DOI: <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i3.937>

8. Pengembangan Keterampilan Empati.²⁹

Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai sosok teladan dalam semua aspek kehidupan termasuk dalam hal kepemimpinan. Setiap hal yang berkaitan dengan beliau memiliki nilai-nilai luhur. Dalam hadis-hadis, terdapat beberapa konsep mengenai kepemimpinan yang ideal dan bisa dijadikan kriteria kepemimpinan yang dapat diimplemmentasikan hingga era kontemporer, diantaranya:

1. Memiliki jiwa kepemimpinan: kepemimpinan tidak harus dipegang oleh suku Quraisy, melainkan harus memiliki sifat-sifat kepemimpinan yang kharismati, tegas, dan Tangguh. Fokus utama kepemimpinan bukan terletak pada suku, tetapi pada karakteristik yang memungkinkan seseorang menjadi pemimpin yang baik.
2. Profesional: Kepemimpinan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Seorang pemimpin yang baik adalah mereka yang memiliki kompetensi yang mumpuni dan selalu mengutamakan kepentingan orang yang dipimpinnya. Kewenangan yang dimilikinya harus digunakan untuk melayani, bukan untuk mendominasi.
3. Mampu melaksanakan tugas: Seorang pemimpin harus berperan sebagai perisai atau pelindung bagi rakyatnya, menjaga keamanan dan kesejahteraan mereka. Kepemimpinannya bukan untuk memanfaatkan kekuasaan sebagai alat penyerang atau penindas, tetapi sebagai pelindung yang memberikan rasa aman, keadilan, dan dukungan. Pemimpin yang ideal melindungi rakyatnya dari ancaman, baik dari dalam maupun luar, serta membangun lingkungan yang adil dan Sejahtera.
4. Sesuai dengan aspirasi rakyat: Pramitha mengungkapkan bahwa suatu negara dapat dipimpin dengan baik jika ada keterwakilan yang kuat dari rakyat. Anggota dewan, sebagai wakil rakyat, harus mampu menyalurkan aspirasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Dengan melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan, pemimpin dapat memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat.
5. Musyawarah: Pemilihan dan pengangkatan seorang pemimpin sebaiknya dilakukan melalui musyawarah anggota masyarakat. Dalam konteks kepemimpinan, musyawarah sering diartikan sebagai bentuk demokrasi, yaitu melibatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan

²⁹ Munir dan Farida Isroani, Konsep dan Implementasi Perspektif Hukum Islam: Kepemimpinan Modern dalam Kajian Hadist. *Tabasyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora*. Vol, 5. No, 3, 2024, h. 263-266. DOI: <https://doi.org/10.59059/tabasyir.v5i3.1548>

pemimpin.³⁰

H. Rekonstruksi Kepemimpinan Islam sebagai Paradigma Etis dalam Tata Kelola Kontemporer

Berdasarkan berbagai konsep kepemimpinan yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini menemukan bahwa relevansi kepemimpinan Islam pada era kontemporer tidak hanya terletak pada dimensi normatifnya, tetapi juga pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan kebutuhan tata kelola modern. Selama ini, kajian kepemimpinan Islam sering kali berfokus pada aspek teologis dan historis seperti konsep khalifah, imamah, amir, dan ulil amri. Padahal, nilai-nilai yang terkandung dalam konsep tersebut memiliki keterkaitan yang kuat dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan modern.

Prinsip amanah dalam Islam dapat dipahami sebagai bentuk akuntabilitas publik yang mengharuskan pemimpin mempertanggungjawabkan seluruh kebijakan dan tindakan yang diambil kepada masyarakat dan kepada Allah SWT. Konsep ini memiliki kesesuaian dengan prinsip *accountability* dalam teori *good governance* yang menuntut adanya transparansi, pengawasan, dan pertanggungjawaban publik.³¹

Demikian pula prinsip musyawarah (*asy-syura*) menunjukkan adanya keselarasan dengan konsep *participatory governance* yang menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam proses pengambilan keputusan. Al-Qur'an memerintahkan agar urusan bersama diselesaikan melalui musyawarah sehingga keputusan yang dihasilkan tidak bersifat otoriter dan lebih mencerminkan kepentingan masyarakat secara luas.³² Dalam konteks negara demokratis modern, prinsip ini dapat diwujudkan melalui mekanisme representasi politik, konsultasi publik, dan partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan.

Sementara itu, prinsip keadilan (*al-'adl*) merupakan fondasi utama yang menghubungkan kepemimpinan Islam dengan tujuan pemerintahan modern. Keadilan dalam perspektif Islam tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum secara formal, tetapi juga mencakup distribusi kesejahteraan, perlindungan hak-hak warga negara, penghapusan

³⁰ Fika Ratna Pratiwi, *Konsep Kepemimpinan Islam (Studi Komparatif Al-Qur'an dan Hadis)*. Karakter: *Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*. Vol, 2. No, 2, 2925, h. 294-306. DOI: <https://doi.org/10.61132/karakter.v2i2.615>

³¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2013), h. 421.

³² M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 301.

diskriminasi, serta pencegahan penyalahgunaan kekuasaan.³³ Oleh karena itu, keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya diukur dari stabilitas politik atau pertumbuhan ekonomi, melainkan dari kemampuannya menghadirkan keadilan substantif bagi masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Islam dapat direkonstruksi sebagai paradigma kepemimpinan etis yang tidak bertentangan dengan sistem pemerintahan modern. Sebaliknya, nilai amanah, keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab justru dapat memperkuat praktik good governance, meningkatkan kepercayaan publik, serta menjadi solusi terhadap berbagai krisis kepemimpinan yang ditandai oleh korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan menurunnya integritas pejabat publik pada era kontemporer.

I. Hambatan Di Dalam Konsep Kepemimpinan Islam Dalam Penegakan Keadilan Di Era Kontemporer

Dengan perkembangan teknologi yang maju saat ini, masyarakat merasakan banyak manfaatnya. Namun, pendidikan Islam menghadapi tantangan serius, seperti ketidakjujuran yang sering disebut sebagai penyakit berbohong. Oleh karena itu, penting untuk menanamkan akhlak yang baik, termasuk sifat-sifat seperti kejujuran (shiddiq), amanah, adil, musyawarah, dan melakukan yang baik serta mencegah yang buruk, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Hambatan lain yang timbul adalah prevalensi pemimpin yang terlibat dalam korupsi, menolak kritik, bersikap arogan, bahkan menjauh dari contoh teladan yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin. Abdullah Nashih Ulwan mengemukakan bahwa seseorang yang menjauh dari nilai-nilai keagamaan cenderung terjerumus dalam perilaku kafir, penyimpangan, atau kesesatan. Tantangan yang dihadapi dalam masyarakat terkait fungsi dan peran pendidikan Islam, perhatian terhadap problematika kepemimpinan pendidikan Islam di era milenial semakin meningkat di berbagai kalangan. Hal ini menjadi peluang dan tantangan bagi pemimpin untuk memenuhi harapan masyarakat terkait peran dan fungsi pendidikan Islam.³⁴

Meskipun konsep kepemimpinan Islam sangat relevan dan dapat diterapkan dalam kehidupan modern, hambatan besar tetap ada dalam proses penerapannya. Di tengah era globalisasi yang pesat dan kemajuan teknologi yang luar biasa, banyak pemimpin yang terjebak dalam godaan

³³ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Daulah fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Syuruq, 1997), h. 88.

³⁴ Afriandi, dkk., *Kepemimpinan Kontemporer Dalam Pendidikan Islam*. TEKNOS: *Jurnal Pendidikan Dan Teknologi*. Vol. 1. No. 1, 2025, h. 79-89.

untuk menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan ini tidak hanya merusak tatanan sosial dan merugikan masyarakat, tetapi juga mengkhianati amanah yang diberikan oleh Allah SWT. Sebagai konsekuensi dari penyalahgunaan tersebut, muncul ketimpangan sosial, hilangnya kepercayaan terhadap institusi pemerintahan, dan kerusakan moral di tengah masyarakat. Hal ini semakin memperburuk kondisi sosial dan politik, yang seharusnya dikelola dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip kepemimpinan Islam yang berlandaskan pada integritas, keadilan, amanah, dan ketakwaan sangat penting untuk menghadapi tantangan ini. Pemimpin harus senantiasa menyadari bahwa amanah yang mereka pegang bukan hanya sebuah tugas duniawi, tetapi juga tanggung jawab besar yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT, baik di dunia maupun di akhirat. Fenomena seperti korupsi, penyalahgunaan jabatan, dan ketidakadilan semakin merajalela, yang jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar kepemimpinan dalam Islam yang mengedepankan keadilan, amanah, dan kesejahteraan umat. Kondisi ini mengancam tatanan sosial, mengurangi kepercayaan rakyat terhadap institusi pemerintahan, dan merusak moralitas masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemimpin masa kini untuk kembali menegakkan nilai-nilai kepemimpinan Islam yang berorientasi pada kebenaran, transparansi, dan pengabdian kepada umat, demi mewujudkan kesejahteraan bersama dan menciptakan pemerintahan yang adil dan amanah. Namun, meskipun tantangan yang dihadapi dalam kepemimpinan masa kini semakin kompleks, konsep kepemimpinan Islam tetap memberikan solusi yang relevan dan aplikatif. Kepemimpinan Islam menekankan pentingnya integritas, ketakwaan, dan keadilan sebagai nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi. Pemimpin masa kini harus mampu meneladani Rasulullah SAW dalam memimpin dengan kebijaksanaan, keadilan, dan kasih sayang, serta selalu melibatkan rakyat dalam setiap proses pengambilan keputusan melalui prinsip musyawarah (syura).³⁵

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kepemimpinan dalam Islam, mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar yang melandasinya, menjelaskan peran kepemimpinan dalam penegakan keadilan, serta

³⁵ Lisaryad, dkk, *Kepemimpinan (Qiyadah) Dalam Perspektif Islam, IPSSJ: Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, Vol. 2. No, 1, 2024, h. 746-754.

mengkaji implementasi dan tantangan penerapannya dalam konteks kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam tidak dipahami semata sebagai otoritas politik atau kekuasaan formal, melainkan sebagai amanah yang mengandung tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual. Konsep tersebut berakar pada prinsip-prinsip fundamental seperti amanah (trustworthiness), keadilan (al-'adl), musyawarah (asy-syura), tanggung jawab (al-mas'uliyah), dan orientasi pada kemaslahatan umum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis.

Secara substantif, penelitian ini menemukan bahwa penegakan keadilan merupakan inti dari seluruh aktivitas kepemimpinan Islam. Keadilan tidak hanya dimaknai sebagai penegakan hukum secara imparial, tetapi juga mencakup perlindungan hak-hak masyarakat, distribusi kesejahteraan secara proporsional, pencegahan penyalahgunaan kekuasaan, serta pembangunan tata kelola yang berorientasi pada kepentingan publik. Dalam konteks kontemporer, prinsip-prinsip tersebut tetap relevan untuk menjawab berbagai persoalan kepemimpinan modern seperti korupsi, krisis integritas, ketimpangan sosial, lemahnya akuntabilitas publik, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

Kontribusi teoritis penelitian ini terletak pada penegasan bahwa konsep kepemimpinan Islam memiliki kesesuaian dengan berbagai perkembangan teori kepemimpinan modern, khususnya ethical leadership, servant leadership, dan good governance. Nilai amanah dapat dipahami sebagai bentuk akuntabilitas publik, musyawarah sebagai mekanisme partisipatif dalam pengambilan keputusan, dan keadilan sebagai fondasi tata kelola yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kepemimpinan Islam tidak hanya relevan dalam kerangka normatif-keagamaan, tetapi juga dapat diposisikan sebagai paradigma kepemimpinan etis yang mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori kepemimpinan kontemporer.

Dari aspek praktis, penelitian ini memberikan implikasi bahwa nilai-nilai kepemimpinan Islam perlu diintegrasikan ke dalam sistem rekrutmen, pembinaan, dan evaluasi kepemimpinan pada lembaga pemerintahan, pendidikan, maupun organisasi sosial. Penguatan prinsip amanah, keadilan, transparansi, dan musyawarah dapat menjadi instrumen penting dalam membangun tata kelola yang lebih akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Dalam konteks negara demokratis modern, implementasi nilai-nilai tersebut juga berpotensi memperkuat legitimasi kepemimpinan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan studi kepustakaan (library research) yang berfokus pada analisis konseptual dan normatif. Oleh sebab itu, penelitian ini belum mampu mengukur secara empiris efektivitas penerapan prinsip-prinsip kepemimpinan Islam dalam praktik pemerintahan, organisasi, maupun lembaga pendidikan pada berbagai konteks sosial dan politik yang berbeda.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian mendatang disarankan untuk mengembangkan kajian empiris melalui studi kasus, survei, atau pendekatan mixed methods guna menguji implementasi prinsip-prinsip kepemimpinan Islam dalam tata kelola pemerintahan modern. Selain itu, penelitian selanjutnya juga perlu mengeksplorasi relevansi kepemimpinan Islam dalam menghadapi tantangan era digital, kecerdasan artifisial (artificial intelligence), transformasi birokrasi, serta dinamika demokrasi kontemporer sehingga pengembangan konsep kepemimpinan Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dan responsif terhadap perubahan zaman.

Daftar Pustaka

- Afriandi, dkk. 2024. *Kepemimpinan Kontemporer Dalam Pendidikan Islam*. *TEKNOS: Jurnal Pendidikan Dan Teknologi*. Vol, 1. No, 1.
- Akbar, Nadzmi. 2018. *Kepemimpinan Islam Kepemimpinan Yang Membimbing*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Al-Jawzi, Ibn. 2001. *Manaqib Umar ibn al-khattab*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Mawardi. 1985. *Al Ahkam al-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Qaradawi, Yusuf. 1995. *Daur al-zakah fi 'Ilaj al-Musykilat al-Iqtisadiyyah*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Qaradawi, Yusuf. 1997. *Fiqh al-Daulah fi al- Islam*. Kairo: Dar al-Syuruq.
- Atanaya, Desi Salsabilla, dkk. 2025. *Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif Islam: Suatu Studi Literatur*. *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*. Vol, 2. No, 3. DOI: <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i3.937>
- Diana, Ilfi Nur. 2021. *Kepemimpinan Islam*. Malang: UIN-Maliki Press.

- Fazillah, Nur. 2023. Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam. *Journal of Education Sciences and Teacher Training*. Vol. 12, No. 1.
- Hr. Bukhari No. 3475 dan Muslim No.1688.
- HR. Bukhari No. 7138 dan Muslim No. 1829.
- HR. Muslim No.1827.
- Kholis, Nur. 2022. Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam. *Al-Ijtima*. Vol. 3, No. 1.
- Lisaryad, dkk. 2024. Kepemimpinan (Qiyadah) Dalam Perspektif Islam. *IPSSJ: Integrative Perspectives of Social and Science Journal*. Vol, 2, No, 1.
- Mahmudi, Aris, dkk. 2024. *Kepemimpinan dalam pendidikan islam*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Mubarak, Subhan. 2021. Prinsip Kepemimpinan Islam Dalam Pandangan Al-Qur'an. *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* Vol. 1, No .1. <https://doi.org/10.57163/Almuhafidz>.Vol.
- Mubarak, 2021. Konsep Kepemimpinan dalam Islam. *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*. Vol. 7, No. 2.
- Munir dan Farida Isroani. 2024. Konsep dan Implementasi Perspektif Hukum Islam: Kepemimpinan Modern dalam Kajian Hadist. *Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora*. Vol, 5. No, 3. DOI: <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v5i3.1548>
- Pramitha, Devi. 2017. Kajian Tematis Al-Qur'an dan Hadits Tentang Kepemimpinan. *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*. Vol. 3, No. 1. <https://doi.org/10.18860/j-pai.v3i1.3989>
- Pratiwi, Fika Ratna. 2025. Konsep Kepemimpinan Islam (Studi Komparatif Al-Qur'an dan Hadis). *Jurnal Riset Ilmu Pendidikan islam*. Vol. 2, No. 2. DOI: <https://doi.org/10.62359/tafakkur.v2i1.45>
- Qs. Al-Hujurat: 9.
- Qs. An-Nisa': 135.
- Rasfiudin. 2023. Kriteria Pemimpin Dalam Islam. *Jurnal Cerdas Hukum*. Vol. 2, No. 1.
- Ritonga, Roni Rahmad Hasonangan dan Zulkarnaen. 2025. Kajian Implementasi Kepemimpinan Islam (Imamah, Khalifah, Dan Ulil Amri) Di Indonesia. *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*. Vol. 8, No. 2. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i2.2348>
- Rivai, Veithzal. 2004. *Kiat Memimpin Abad Ke-21*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin. 2009. *Islamic Leadership: Membangun Super Leadership Melalui Kecerdasan Spiritual*. Jakarta: Bumi

Aksara.

- Rizqi, Maulidiyah Amaliana dan Abdul Kadir Alamudi. 2025. Analisis Kepemimpinan Islam Pada Era Modern. *Jurnal Manajerial*. Vol. 12, No. 2. <http://dx.doi.org/10.30587/jurnalmanajerial.v12i02.9782>
- Shihab, M. Quraish. 2006. *Membumikan Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2013. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.